

**Jejak Artikel:**

Unggah: 3 Januari 2023;  
Revisi: 4 Januari 2023;  
Diterima: 4 Januari 2023;  
Tersedia Online: 10 April 2023

**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Pemoderasi atas Determinan Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat**

**Farida Hastuti<sup>1</sup>, Mombang Sihite<sup>2</sup>, Darmansyah<sup>3</sup>, Nurmala Ahmar<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Universitas Pancasila  
faridahastuti78@gmail.com

*This study aims to find out and analyze whether the utilization of information technology, internal control systems, and leadership commitment, as well as the competency of its human resources can strengthen the determinant influence on the sustainability of the quality of financial reports in the government. The quantitative method was carried out in this study using data from questionnaires, observations, and interviews on 102 sample respondents within the Ministry of Industry who were taken proportionally using a purposive sampling technique. The statistical testing technique uses the SmartPLS application as an analytical tool in research. The results of the study have shown that the use of information technology, internal control systems, and leadership commitment to the sustainability of the quality of the central government's financial reports directly has a positive and significant effect. With the moderation of human resource competence on the sustainability of the quality of financial reports, the use of information technology and leadership commitment have a positive and significant effect, but significantly have a negative effect on the internal control system.*

**Keywords: Financial Reports, Human Resources Competence, Information Technology, Internal Control System, Leadership Commitment.**

**Pendahuluan**

Pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dituntut untuk menerapkan *Good Government Governance* yang memiliki akuntabilitas terhadap publik. Upaya pemerintah tersebut salah satunya diwujudkan dengan adanya keterbukaan informasi dan tanggungjawab yang baik dalam mengelola keuangan negara, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang “Keuangan Negara” (UU Nomor 17, 2003), yaitu dengan menyampaikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan pemerintah yang relevan dan andal, sesuai dengan Standar Akuntansi

---

<sup>1</sup>Coressponden: Farida Hastuti. Universitas Pancasila. Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630. faridahastuti78@gmail.com

---

---

Pemerintahan dimana pemrosesan transaksi keuangan disediakan oleh suatu sistem akuntansi sampai terciptanya suatu laporan keuangan yang terpercaya bagi *stakeholder*.

Beberapa hal dapat mempengaruhi tingkat korelevan dan keandalan dari suatu laporan keuangan. Diantaranya yaitu komitmen pimpinan, pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi keuangan yang disediakan, serta sistem pengendalian yang digunakan untuk internal pemerintah (SPIP) yang dapat dipengaruhi oleh adanya kompetensi yang dimiliki SDM pada suatu instansi, sehingga kualitas hasil laporan keuangan. Kurangnya pemahaman atas proses dan sistem informasi akuntansi, serta lemahnya pengawasan internal pada keuangan pemerintah yang ada, dapat menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan karena penerapannya tidak optimal.

Penelitian-penelitian pendahulu antara lain adalah penelitian Rosanti dkk., (Roshanti et al., 2014) tentang, “pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, SPIP dan kualitas SDM terhadap kualitas informasi pada pelaporan keuangan pemerintah daerah, dengan hasil yang positif dan signifikan”.

Tetapi hasil penelitian diatas berbanding terbalik dengan penelitian Kartika dan Amalia, (Kartika, HR dan Amalia, 2018), yang menjelaskan bahwa, “kualitas informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh SDM, tetapi tidak demikian dengan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern yang tidak signifikan terhadap nilai informasi dari laporan keuangan pemerintah”.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yendrawati, (Yendrawati, 2013), menyatakan atas determinan kualitas informasi laporan keuangan bahwa, “kapasitas SDM yang dimiliki organisasi memiliki pengaruh positif, sedangkan sistem pengendalian intern yang diterapkan memiliki pengaruh yang negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah”.

Berdasarkan fenomena yang ada serta *research gap* penelitian, dan juga melanjutkan penelitian sebelumnya dari Agusiawan dan Rasmini (Agustiawan & Rasmini, 2016) yang menyampaikan bahwa, “perlu diadakan pelatihan yang dilakukan secara berkala dan kegiatan pengembangan keahlian untuk mengoptimalkan kapasitas SDM khususnya pengetahuan terkait dengan akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi yang sudah tersedia, serta pemahaman mengenai terapan sistem yang baik pada pengendalian intern, akan mempengaruhi peningkatan pada kualitas laporan keuangan, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengaruh sistem pengendalian intern, dan pengaruh komitmen pimpinan terhadap keberlanjutan dari kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat Kementerian Perindustrian. Dan juga, apakah kompetensi SDM dapat menguatkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Pada saat penelitian ini dibuat dapat dilihat jumlah keseluruhan pegawai pusat di lingkungan Kementerian Perindustrian dari 9 Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

**eCo-Buss**

**Tabel 1. Jumlah Pegawai Unit Kerja Pusat Eselon I Kementerian Perindustrian**

No	Unit Kerja Eselon I	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS	PNS Bagian Keuangan	Non PNS Bagian Keuangan
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	105	18	11	5
2	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	148	30	17	12
3	Direktorat Jenderal Industri Agro	122	15	11	10
4	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	129	17	10	7
5	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	137	20	12	9
6	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	139	10	14	4
7	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	159	9	9	4
8	Inspektorat Jenderal	106	14	18	9
9	Sekretariat Jenderal	353	45	20	4
	Jumlah	<b>1.398</b>	<b>178</b>	<b>122</b>	<b>64</b>

Sumber: Biro Organisasi dan SDM Kementerian Perindustrian, 2021.

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat jumlah keseluruhan pegawai pusat yang terdiri dari 1.398 orang PNS dan 178 orang Non PNS. Sementara untuk masing-masing unit eselon I pusat memiliki pegawai yang bertugas pada unit bagian keuangan yang terdiri dari 122 orang PNS dan 64 orang NON PNS. Dan jumlah keseluruhan pegawai pusat yang bekerja pada unit bagian keuangan Eselon I Kementerian Perindustrian berjumlah 186 orang.

**Kajian Literatur**  
**Teori Stakeholder**

Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi kemajuan bisnis di era 4.0 seperti sekarang, dimana perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan *stakeholder* baik internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan, tidak terbatas hanya kepada pemegang saham saja seperti dimasa lampau. Selain memenuhi tuntutan moral, diharapkan juga akan meningkatkan manfaat ekonomi baik bagi negara maupun perusahaan serta menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan (*going concern*). Dari sinilah teori *stakeholder* kemudian berkembang.

Dalam teori *stakeholder* dinyatakan bahwa, “perusahaan sebagai entitas ekonomi tidak saja beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan/ *stakeholder*. *Stakeholder* itu meliputi para pemegang saham, pegawai, *supplier*, kreditor, pemerintah, para analis, konsumen, masyarakat, serta pesaing” (Chariri & Ghozali, 2007). Peran *stakeholder* ini beragam mulai dari terlibatnya *stakeholder* dalam pengambilan keputusan, mengatur jalannya perusahaan, berperan sebagai pendukung finansial/keuangan perusahaan, sampai dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada akhirnya kelompok *stakeholder* ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama apakah perusahaan akan mengungkapkan informasi dalam laporan perusahaan atau tidak terkait rencana bisnis ke depan.

Tujuan teori *stakeholder* yang utama adalah meningkatnya penciptaan nilai sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga manajemen perusahaan akan terbantu, tujuan lain adalah untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul bagi *stakeholder*. Dengan demikian, harapan perusahaan untuk berkembang dan bertahan dimasa mendatang lebih besar.

### **Teori Akuntansi Sektor Publik**

Meskipun dalam mencapai tujuan sektor publik dan sektor swasta menggunakan proses pengendalian dan sumber daya yang sama, tetapi sektor publik dan sektor swasta berbeda, begitu pula dengan akuntansi yang digunakan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

Akuntansi sektor publik memiliki cakupan tugas yang lebih luas dibanding akuntansi sektor swasta, meskipun beberapa tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan oleh akuntansi sektor swasta.

Akuntansi sektor publik merupakan pengelolaan dana masyarakat yang diserahkan kepada negara yang menggunakan analisis akuntansi serta mekanisme teknik pada kementerian/lembaga negara, pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD, LSM, yayasan sosial serta proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2006).

Di Indonesia perkembangan akuntansi sektor publik cukup signifikan, yang ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, dimana perkembangan tersebut meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan pemeriksaan.

### **Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dilengkapi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menjadi konsep dasar dalam menyusun dan mengembangkan SAP, serta menjadi acuan bagi penyusun, pemeriksa serta pengguna laporan (PP Nomor 71, 2010).

Laporan keuangan yang berkualitas berisi informasi yang memiliki kemampuan untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi pengguna, memenuhi kebutuhan dalam pengambilan keputusan, handal, bebas dari kesalahan material dan pengertian yang dapat menyesatkan, serta dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya (Defitri, 2016)(Defitri, 2016).

Kualitas laporan keuangan dapat di lihat dari informasi yang disajikan, apakah sudah memenuhi empat kriteria dan unsur-unsur pembentuk dari kualitas laporan keuangan sehingga informasi tersebut mempunyai nilai atau manfaat. Kriteria dan unsur-unsur kualitas laporan keuangan tersebut adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan tersebut.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Thompson dkk., (Thompson et al., 1991) menyatakan bahwa, “pemanfaatan teknologi informasi merupakan harapan pengguna sistem informasi atas manfaat yang diperoleh dimana teknologi informasi dapat mempermudah pelaksanaan tugas”. Hal ini juga berpengaruh terhadap perilaku pengguna pada saat melakukan pekerjaannya. Pengukurannya didasarkan pada intensitas dan frekuensi pemanfaatan teknologi informasi, serta jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Kaitannya dengan laporan keuangan, Kementerian Keuangan telah menciptakan aplikasi untuk mempermudah tugas dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Mulai dari tahap perencanaan sampai penyusunan dan penyajian laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari laporan penggunaan anggaran sampai pengelolaan barang milik negara.

Besarnya dana yang dibutuhkan serta resiko yang tinggi saat berinvestasi pada bidang teknologi informasi diperlukan faktor-faktor yang berpotensi menjadi pengaruh dalam pemanfaatan teknologi informasi tersebut terhadap individu dengan pemahaman yang baik, sehingga dibutuhkan pula SDM yang kompeten dalam pengoperasiannya.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Pengendalian intern merupakan cara suatu organisasi/perusahaan untuk melakukan perlindungan terhadap aset-aset yang dimilikinya dengan cara melakukan pengawasan, pengarahan, dan pengukuran kemampuan sumber daya manusianya. Dalam rangka pengendalian tersebut maka diperlukan sistem yang dapat memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku.

Pemerintah dalam menjalankan tugas pokok, visi dan misinya menerapkan sistem pengendalian intern yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Peraturan ini memuat pokok pengertian tentang sistem pengendalian intern sebagai upaya yang dilakukan organisasi secara berkesinambungan oleh seluruh pegawai dari jenjang bawah sampai dengan puncak dalam memberikan keyakinan yang cukup sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Tujuan tersebut terdiri dari kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan terhadap aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mana kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu.

Menurut Bastian dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” (Bastian, 2010) menyatakan bahwa, “sistem pengendalian intern merupakan suatu proses dimana pihak eksekutif yaitu pimpinan daerah, instansi/dinas, dan seluruh perangkatnya menjalankan suatu desain untuk memberikan kepercayaan yang cukup tentang pencapaian akan tiga hal. Tiga hal tersebut terdiri dari efektifitas dan efisiensi operasi organisasi, penyajian laporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Sistem pengendalian intern memiliki unsur fungsi sebagai pedoman dan tolak ukur atas pengujian efektivitas terselenggaranya sistem pengendalian intern, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

### **Komitmen Pimpinan**

Penerapan kebijakan dan peraturan dalam suatu organisasi dapat dilakukan karena pengaruh besar komitmen dari seorang pemimpin. Pemimpin merupakan salah satu pemegang aspek yang paling penting dalam sistem manajemen yang dengan kemampuannya dapat memengaruhi kinerja untuk keberlangsungan suatu organisasi saat ini dan yang akan datang.

Beberapa aspek dari komitmen pimpinan dapat dilihat antara lain melalui keterlibatan yang dilakukan pimpinan dalam mengevaluasi dan menempatkan sumber daya manusia sehingga tepat guna, dukungan untuk memotivasi pegawai agar dapat menjalani tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, serta adanya sosialisasi mengenai kebijakan atau peraturan tertulis kepada seluruh

pegawai, dan tak kalah penting adalah melaksanakan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia memberikan pengaruh potensial bagi kesuksesan suatu organisasi. Kemampuan sumber daya manusia dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan ke dalam pekerjaan mereka menjadikan organisasi memiliki daya saing lebih dibanding organisasi lainnya. Kompetensi sumber daya manusia merupakan perpaduan antara pengetahuan, proses pembelajaran secara berkesinambungan, para karyawan yang memiliki kompetensi inti dalam rangka mencapai tujuan dan program-program organisasi, serta menyelesaikan tugas-tugas fungsional mereka (Yaseen et al., 2016).

Organisasi mengeluarkan dana cukup besar dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga dapat memberikan keunggulan bersaing bagi organisasi. Pengembangan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis, serta lanjutan sekolah merupakan langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Berdasarkan landasan teori yang telah disampaikan, maka dapat didefinisikan 3 (tiga) variabel independen (X) yakni pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan komitmen pimpinan, serta kompetensi sumber daya manusia yang berperan sebagai pemoderasi sehingga dapat diduga akan memperkuat pengaruh variabel determinan terhadap keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (Y) khususnya di Kementerian Perindustrian.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dkk., (Indriasari, 2008a)(Indriasari, 2008) menunjukkan bahwa, “laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh teknologi informasi yang diterapkan sehingga tersajinya laporan keuangan mampu memenuhi kaedah andal dan tepat waktu”. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia ternyata tidak mempengaruhi keandalan laporan keuangan yang nyatanya dapat mempengaruhi ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.

Merujuk pada tulisan-tulisan tentang teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh organisasi/instansi dapat terlihat bahwa penggunaan teknologi informasi untuk mengelola dana APBN/APBD meningkat tajam dari tahun ke tahun. Di tambah lagi jumlah transaksi yang semakin banyak dan kompleks mendorong pemanfaatan teknologi informasi menjadi lebih utama untuk memberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh beberapa determinan diantaranya adalah teknologi informasi yang digunakan. Pengaplikasian teknologi informasi memberikan pengaruh yang berdampak positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah karena dapat mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan tertentu. Dengan demikian, hipotesis yang dibangun dalam penelitian berdasarkan hal di atas adalah:

H<sub>1</sub>: Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

## eCo-Buss

---

---

Selain penggunaan teknologi informasi, ada determinan lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu sistem pengendalian intern. Mahmudi (Mahmudi, 2005) dalam buku “Manajemen Kinerja Sektor Publik” menyatakan bahwa, “Sistem Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah berikut dengan proses dan tahapan-tahapan yang harus diikuti, termasuk di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)”. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah dan bagaimana sistem pengendalian intern tersebut dilaksanakan.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah secara signifikan, karena penerapan sistem pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pelaksanaan pemantauan akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, hipotesis yang dibangun dalam penelitian berdasarkan hal di atas adalah:

H<sub>2</sub>: Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

Pada tahun 2017, Widari dan Sutrisno (Widari & Sutrisno, 2017) melakukan penelitian mengenai hubungan komitmen pimpinan dengan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh komitmen pimpinan secara positif dan signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa komitmen pimpinan memegang peranan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan kualitas dari laporan keuangan yang tersaji. Dengan demikian, hipotesis yang dibangun dalam penelitian berdasarkan hal di atas adalah:

H<sub>3</sub>: Pengaruh komitmen pimpinan terhadap keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

Selain tiga hipotesis di atas terdapat beberapa hipotesis terkait dengan variabel yang menguatkan atau melemahkan pengaruh variabel-variabel independen tersebut. Berikut adalah variabel yang dijadikan moderasi atas variabel independen yang diajukan.

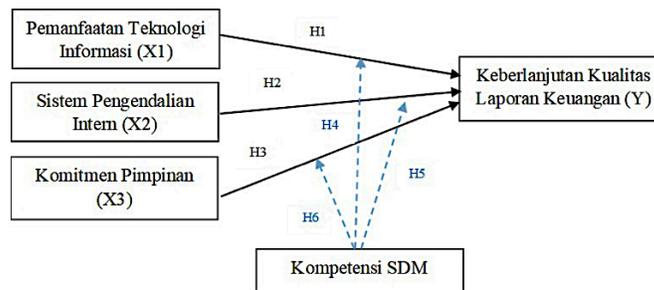
H<sub>4</sub>: Kompetensi SDM menguatkan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

H<sub>5</sub>: Kompetensi SDM menguatkan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

H<sub>6</sub>: Kompetensi menguatkan pengaruh komitmen pimpinan terhadap keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

Dari hubungan variabel berdasarkan teori dan penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis di atas, maka dapat disampaikan kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:

**eCo-Buss**



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

**Metode**

Metoda penelitian digunakan adalah metoda penelitian kuantitatif. Metode ini mampu menggambarkan dan menganalisis hubungan kausalitas antar variabel yang digunakan untuk keenam hipotesis penelitian yang akan diuji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang utama yaitu menyebarkan kuesioner kepada para responden terpilih, melaksanakan kegiatan wawancara secara langsung kepada responden, dan melakukan observasi lapangan.

Populasi pada penelitian yaitu seluruh pegawai unit kerja pusat di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan jumlah 1.398 orang pegawai sesuai tabel 1 di atas. Dari populasi tersebut sebanyak 186 sampel telah diambil berdasarkan pertimbangan bahwa ke-186 pegawai tersebut merupakan pegawai yang bertugas pada unit-unit kerja pusat bagian keuangan dan TU di lingkungan Kementerian Perindustrian yang masih/pernah bertugas sebagai penyusun laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara, dengan kriteria sampel sudah bekerja lebih dari 1 tahun di bidang keuangan. Sampel yang diambil secara proporsional dengan menggunakan *teknik purposive* sampling sudah tentu menjadi responden yang akan digunakan untuk menghasilkan data primer. Data primer yang diperoleh merupakan jenis data yang sudah digeneralisasi dari hasil penyampaian kuesioner para responden yang diisi secara online.

Adapun jumlah kuesioner yang dapat dianalisis tercermin dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Kuesioner yang akan di Analisis**

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	186
Kuesioner yang diterima melalui Google Form	102
Kuesioner yang tidak terdeskripsi	0
Kuesioner yang digunakan	102

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2022

Sesuai tabel 2 di atas, dari 186 kuesioner yang disebar, sebanyak 102 kuesioner dapat diterima dan terdeskripsi sehingga 102 kuesioner tersebut dapat diolah untuk menjadi data dalam penelitian.

**eCo-Buss**

**Tabel 2. Operasionalisasi Variabel**

Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator	Skala	Sumber
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat teknologi informasi</li> <li>- Pengelolaan Data Keuangan</li> <li>- Perawatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka peluang untuk dapat mengakses informasi keuangan secara cepat dan akurat</li> <li>- Ketersediaan komputer dan <i>software</i></li> <li>- Jaringan internet terpasang</li> <li>- Proses akuntansi terkomputerisasi</li> <li>- Pengolahan data keuangan dengan <i>software</i></li> <li>- Laporan keuangan merupakan hasil terpadu dari sistem informasi</li> <li>- Teknologi informasi mempengaruhi ketepatanwaktuan laporan keuangan</li> <li>- Dilakukan pendataan dan perbaikan terhadap perangkat yang rusak</li> </ul>	Ordinal	Sumber: Jurnal dan Supomo (2002)
Sistem Pengendalian Intern (X2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkungan pengendalian</li> <li>- Penilaian risiko</li> <li>- Kegiatan pengendalian</li> <li>- Informasi dan komunikasi</li> <li>- Pemantauan pengendalian intern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian menerapkan kode etik tertulis</li> <li>- Pimpinan telah berperilaku sesuai kode etik</li> <li>- Pencegahan pelanggaran dilakukan secara lengkap dan menyeluruh melalui suatu analisis</li> <li>- Pengurangan risiko pelanggaran terhadap prosedur akuntansi dan sistem dilakukan dengan rencana pengelolaan</li> <li>- Setiap transaksi dan aktifitas keuangan telah diotorisasi oleh pihak terkait</li> <li>- Tugas dipisahkan sesuai tugas pokok dan fungsi</li> <li>- Pemanfaatan sarana komunikasi yang telah disediakan</li> <li>- Sistem informasi senantiasa dikelola, dikembangkan dan diperbaharui</li> <li>- Melaksanakan tindak lanjut hasil temuan BPK/Itjen</li> </ul>	Ordinal	Sumber: PP Nomor 60 Tahun 2008
Komitmen Pimpinan (X3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan Pimpinan</li> <li>- Kebijakan pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi dan penempatan sumber daya</li> <li>- Dukungan pimpinan</li> <li>- Kebijakan pimpinan dalam pengelolaan keuangan</li> <li>- Sosialisasi kebijakan</li> </ul>	Ordinal	Sumber: Noviani (2017)
Kompetensi Sumber Daya Manusia (M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan</li> <li>- Keterampilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan mengenai peraturan keuangan yang terkait</li> <li>- Mengikuti perkembangan aplikasi keuangan</li> <li>- Kompetensi dibidang teknologi informasi</li> <li>- Kemampuan intelektual</li> <li>- Kemampuan teknis dan fungsional</li> <li>- Kemampuan personal</li> <li>- Kemampuan intrapersonal dan komunikasi</li> <li>- Mengedepankan asas layanan dan sensitifitas terhadap tanggung jawab sosial</li> <li>- Kemauan belajar dan mengembangkan diri</li> <li>- bertanggungjawab, andal, tepat waktu, dan saling menghargai</li> </ul>	Ordinal	Sumber: Spencer (2009:46) Sudarmanto (2009)

### eCo-Buss

	- Sikap Perilaku			
Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relevan</li> <li>- Andal</li> <li>- Dapat Dibandingkan</li> <li>- Dapat Dipahami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai SAP</li> <li>- Tepat waktu</li> <li>- Memiliki manfaat <i>feedback value</i></li> <li>- Teruji kebenarannya</li> <li>- Jujur</li> <li>- Dapat dibandingkan</li> <li>- Mudah dimengerti dan dipahami</li> <li>- Sesuai batas pemahaman pengguna</li> </ul>	Ordinal	Sumber: Deddi Nordiawan (2010:44)

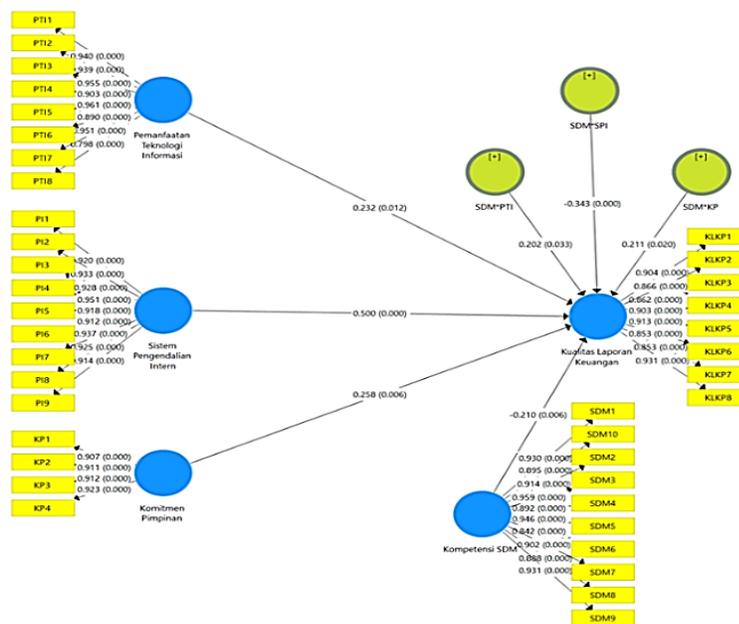
Dalam melakukan evaluasi perhitungan statistik pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis PLS-SEM dengan pertimbangan bahwa, pendekatan analisis ini dapat memprediksi ukuran model yang relevan dari hasil estimasi parameter-parameter ukur model itu sendiri, walaupun dasar teori memiliki kelemahan dan tidak akan cukup untuk memenuhi asumsi kalau hanya berbasis kovarian pada SEM saja.

Selain itu PLS-SEM memiliki beberapa kelebihan dalam studi kasus, diantaranya: 1) tidak membatasi jumlah pada banyaknya sampel, 2) dapat mengatasi distribusi data yang tidak normal secara multivariate, 3) mengatasi *value* yang hilang, dan 4) masalah multikolonieritas antar variabel yang berkorelasi dapat diatasi (Ghozali & Latan, 2015).

## Hasil

### Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tahap evaluasi pengukuran model di bawah merupakan perhitungan dari algoritma PLS yang telah menunjukkan hasil dari evaluasi dimana kriteria validitas dan reliabilitas telah terpenuhi dengan hasil yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2. Hasil Kalkulasi PLS Alg.

### Pengujian Validitas

Uji validitas konvergen pada paramater *outer loading* atau *loading factor* ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 3. Uji Validitas Loading Factor**

KKLP 1	0.904	PTI 1	0.940	SP 1	0.920	KP 1	0.907	SDM 1	0.930
KKLP 2	0.866	PTI 2	0.939	SP 2	0.933	KP 2	0.911	SDM 2	0.914
KKLP 3	0.862	PTI 3	0.955	SP 3	0.928	KP 3	0.912	SDM 3	0.959
KKLP 4	0.093	PTI 4	0.903	SP 4	0.951	KP 4	0.923	SDM 4	0.892
KKLP 5	0.913	PTI 5	0.961	SP 5	0.918			SDM 5	0.946
KKLP 6	0.853	PTI 6	0.890	SP 6	0.912			SDM 6	0.842
KKLP 7	0.853	PTI 7	0.951	SP 7	0.937			SDM 7	0.902
KKLP 8	0.931	PTI 8	0.798	SP 8	0.925			SDM 8	0.888
				SP 9	0.914			SDM 9	0.931
								SDM 10	0.895

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2022

Uji validitas konvergen dengan parameter *outer loading* pada tabel 3 sudah menunjukkan validitas yang direkomendasikan, yakni di atas 0,7.

Uji validitas konvergen pada paramater AVE ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 4. Average Variance Extracted**

Variabel	AVE	Keterangan
PTI (X1)	0.844	Valid
SPI (X2)	0.858	Valid
KP (X3)	0.834	Valid
KKLKP (Y)	0.785	Valid
KSDM (M)	1.000	Valid

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2022

Uji validitas konvergen dengan parameter AVE pada tabel 3 sudah menunjukkan validitas konvergen yang direkomendasikan, yakni di atas 0,5.

Uji validitas diskriminan pada paramater *Fornell Larcker* ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 5. Uji Validitas Fornel Larcker**

	KLKP	KP	PI	PTI	SDM	SDM* KP	SDM* PTI	SDM* SPI	AVE	√AVE
KKLP	0.886								0.785	0.886
KP	0.488	0.913							0.834	0.913
PI	0.582	0.318	0.926						0.858	0.926
PTI	0.311	0.494	0.232	0.919					0.844	0.919
SDM	-0.303	0.123	-0.198	0.228	0.910				0.829	0.910
SDM*KP	0.049	-0.158	-0.203	-0.261	-0.083	1.000			1.000	1.000
SDM*PTI	0.155	-0.257	-0.008	-0.271	-0.150	0.554	1.000		1.000	1.000
SDM*SPI	-0.218	-0.217	0.135	-0.008	0.080	0.335	0.264	1.000	1.000	1.000

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2022

Uji validitas diskriminan dengan paramater *Fornell Larcker* pada tabel 5 sudah menunjukkan validitas ukuran akar AVE pada korelasi konstraknya, yakni lebih besar dari ukuran akar AVE pada korelasi konstruk lainnya.

### Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas konstruk pada parameter *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 6. Composite Reliability Dan Cronbach Alpa**

Variabel	Composite	Cronbach Alpha	Keterangan
PTI (X1)	0.977	0.973	Reliabel
SPI (X2)	0.982	0.979	Reliabel
KP (X3)	0.953	0.934	Reliabel
KKLKP (Y)	0.967	0.961	Reliabel
KSDM (M)	1.000	1.000	Reliabel

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2022

Uji reliabilitas konstruk dengan parameter *composite reliability* pada tabel 6 sudah menunjukkan reliabilitas yang direkomendasikan pada setiap konstruk, yakni di atas 0,7. Uji reliabilitas konstruk dengan parameter *cronbach's alpha* pada tabel 5 juga sudah menunjukkan reliabilitas yang direkomendasikan pada setiap konstruk, yakni di atas 0,7.

### Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

#### *Path Coefficient*

Uji koefisien jalur ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 7. Path Coefficient**

Variabel	Path Coefficient
KP → KKLKP	0.258
PTI → KKLKP	0.232
SDM*KP → KKLKP	0.211
SDM*PTI → KKLKP	0.202
SDM*SPI → KKLKP	-0.343
SPI → KKLKP	0.500

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2022

Uji koefisien jalur pada tabel 7 menunjukkan variabel independen (*eksogen*) KP, PTI, dan SPI secara parsial memiliki arah hubungan yang positif terhadap variabel dependen (*endogen*) KKLKP. Dan secara simultan variabel independen (*eksogen*) KP dan PTI dengan pengaruh moderasi variabel SDM memiliki arah hubungan yang positif terhadap variabel dependen (*endogen*) KKLKP, kecuali variabel independen (*eksogen*) SPI secara simultan dengan pengaruh moderasi variabel SDM memiliki arah hubungan yang negatif.

### Pengujian R Square

Uji R-Square ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 8. R Square Adjusted**

	R Square	R Square Adjusted	Besar Pengaruh
Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan	0.674	0.650	<b>Kuat</b>

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2022

Uji R-Square pada tabel 8 menunjukkan koefisien determinasi dari variabel independen (KP, PTI, dan SPI) yang mampu menjelaskan variabel dependen (KCLKP) sebesar 0.674 persen, sedangkan sisanya merupakan variabel lain di luar variabel yang diteliti.

### Pengujian *f-Square* ( $f^2$ )

Uji *f-Square* ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 9. Hasil Uji *f-Square*

Variabel	F-Square	Besar Pengaruh
PTI → KCLKP	0.111	Lemah
SPI → KCLKP	0.532	Kuat
KP → KCLKP	0.125	Lemah
SDM*KP	0.090	Lemah
SDM*PTI	0.095	Lemah
SDM*SPI	0.267	Kuat

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2022

Uji *f-Square* pada tabel 9 menunjukkan hubungan yang memiliki tingkat substansi yang diinterpretasikan lemah pada empat variabel dan hubungan yang memiliki tingkat substansi dengan interpretasi kuat pada dua variabel. Variabel sistem pengendalian intern dengan keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat memiliki nilai  $f^2$  paling besar dengan pengaruh kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam jangka panjang keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dapat dipertahankan karena adanya peran penerapan sistem pengendalian intern yang baik.

### Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis menggunakan dua arah (2-tailed) dengan tingkat signifikansi 0.05 dan t-table 1.96, ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 10. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Kode	Variabel	Path Coefficients	T Stat	P Value	Hasil Pengujian
H1	PTI → KCLKP	0.232	2.510	0.012	<b>H0 ditolak</b>
H2	SPI → KCLKP	0.500	5.096	0.000	<b>H0 ditolak</b>
H3	KP → KCLKP	0.258	2.768	0.006	<b>H0 ditolak</b>
H4	SDM*PTI → KCLKP	0.202	2.135	0.033	<b>H0 ditolak</b>
H5	SDM*SPI → KCLKP	-0.343	3.828	0.000	<b>H0 ditolak</b>
H6	SDM*KP → KCLKP	0.211	2.331	0.020	<b>H0 ditolak</b>

Sumber: Hasil olah data penelitian, 2022

### Hipotesis 1. Pengaruh Langsung antara Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) terhadap Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (KCLKP)

Hasil perhitungan pengaruh langsung dalam hipotesis 1 menunjukkan bahwa PTI terhadap KCLKP memiliki koefisien jalur 0,232 dengan t-statistik 2,510 > t-tabel 1,96 dan nilai p-value 0,012 < 0,05 (tingkat signifikansi 5%). Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa PTI memiliki arah positif dan berpengaruh langsung dengan signifikan terhadap KCLKP, sehingga hipotesis 0 ditolak.

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0.232 pada Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setiap adanya peningkatan satu satuan Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang dapat diartikan, bahwa semakin meningkatnya pengaruh langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi akan meningkatkan Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara bersamaan.

Sejalan dengan pendapat Nurillah dan Muid (Nurillah & Muid, 2014) yang menyatakan bahwa, “pemanfaatan teknologi informasi yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh terhadap kualitas hasil laporan keuangan yang juga akan semakin tinggi”. Pemanfaatan teknologi informasi pada subbagian akuntansi/keuangan dari awal transaksi hingga penyusunan laporan keuangan yang di dukung oleh *software* yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tersedianya sarana seperti komputer dan jaringan internet membantu pengelola keuangan pemerintah untuk dapat menjaga kualitas dari laporan keuangan yang disajikan

### **Hipotesis 2. Pengaruh Langsung Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (KKLKP)**

Hasil perhitungan pengaruh langsung dalam hipotesis 2 menunjukkan bahwa SPI terhadap KKLKP memiliki koefisien jalur 0,500 dengan t-statistik 5,096 > t-tabel 1,96 dan nilai p-value  $0,000 < 0,05$  (tingkat signifikansi 5%). Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa SPI memiliki arah positif dan berpengaruh langsung dengan signifikan terhadap KKLKP, sehingga hipotesis 0 ditolak.

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0.500 pada Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setiap adanya peningkatan satu satuan Sistem Pengendalian Intern pemerintah, yang dapat diartikan, bahwa semakin meningkatnya pengaruh langsung Sistem Pengendalian Intern pemerintah akan meningkatkan Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara bersamaan.

Terpenuhinya indikator-indikator sistem pengendalian intern seperti pemeriksaan atas catatan akuntansi, fisik kas, barang secara terus menerus, ditambah dengan standar kompetensi yang terpenuhi untuk setiap pokok tugas dan fungsi, pimpinan yang melakukan analisis dan rencana pengelolaan untuk mengurangi resiko timbulnya pelanggaran, kebijakan pengamanan fisik atas aset yang dimiliki, informasi yang disediakan tepat waktu, serta tindak lanjut setiap hasil temuan/reviu atas saran BPK maupun inspektorat memudahkan instansi untuk menjaga keberlanjutan dari kualitas laporan keuangan yang disampaikan.

Sejalan dengan penelitian dari Roshanti dkk., (Roshanti et al., 2014)(Roshanti et al., 2014) yang menyatakan bahwa, “sistem pengendalian intern berpengaruh positif dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas”.

### **Hipotesis 3. Pengaruh Langsung Komitmen Pimpinan (KP) terhadap Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (KKLKP)**

Hasil perhitungan pengaruh langsung dalam hipotesis 3 menunjukkan bahwa KP terhadap KKLKP memiliki koefisien jalur 0,258 dengan t-statistik 2,768 > t-tabel 1,96 dan nilai p-value  $0,006 < 0,05$  (tingkat signifikansi 5%). Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa KP memiliki arah positif dan berpengaruh langsung dengan signifikan terhadap KKLKP, sehingga

hipotesis 0 ditolak.

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0.258 pada Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setiap adanya peningkatan satu satuan Komitmen Pimpinan, yang dapat diartikan, bahwa semakin meningkatnya pengaruh langsung Komitmen Pimpinan akan meningkatkan Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara bersamaan.

Sejalan dengan penelitian Fitriani (Fitriani, 2017) yang menyatakan bahwa, “pimpinan yang berkomitmen tinggi akan lebih mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan dirinya secara pribadi dalam usaha mencapai keberhasilan organisasi menjadi lebih baik”. Namun bertentangan dengan pendapat Yeny dkk., (Yeny et al., 2016) yang menyatakan, “bahwa komitmen pimpinan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil laporan keuangan”.

#### **Hipotesis 4. Pengaruh Langsung antara Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) terhadap Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (KKLKP) yang dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Hasil perhitungan pengaruh langsung dalam hipotesis 4 menunjukkan bahwa PTI terhadap KKLKP yang dimoderasi SDM memiliki koefisien jalur 0,202 dengan t-statistik 2,135 > t-tabel 1,96 dan nilai p-value 0,033 < 0,05 (tingkat signifikansi 5%). Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa PTI yang dimoderasi SDM memiliki arah positif dan berpengaruh langsung dengan signifikan terhadap KKLKP, sehingga hipotesis 0 ditolak.

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0.202 pada Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setiap adanya peningkatan satu satuan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dipengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang dapat diartikan, bahwa semakin meningkatnya pengaruh langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dipengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia akan meningkatkan Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara bersamaan.

Sejalan dengan Armel (Armel, 2017), yang berpendapat bahwa, “untuk mencapai tujuan instansi dalam menyediakan laporan keuangan yang berkualitas secara terus menerus yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga memiliki ketrampilan dan kecakapan yang disyaratkan”.

#### **Hipotesis 5. Pengaruh Langsung antara Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (KKLKP) yang dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Hasil perhitungan pengaruh langsung dalam hipotesis 5 menunjukkan bahwa SPI terhadap KKLKP yang dimoderasi SDM memiliki koefisien jalur -0,343 dengan t-statistik 3,828 > t-tabel 1,96 dan nilai p-value 0,000 < 0,05 (tingkat signifikansi 5%). Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa SPI yang dimoderasi SDM memiliki arah negatif dan berpengaruh langsung dengan signifikan terhadap KKLKP, sehingga hipotesis 0 ditolak.

Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan adanya penurunan sebesar -0.343 pada Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setiap adanya peningkatan satu satuan Sistem Pengendalian Intern yang dipengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang dapat diartikan, bahwa semakin meningkatnya pengaruh langsung Sistem Pengendalian Intern

---

---

yang dipengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia akan menurunkan Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara bersamaan.

Dalam pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah dituntut untuk melakukan pengawasan internal mulai dari tahap perencanaan sampai kegiatan telah selesai dilaksanakan dan diserahterimakan. Sumber daya yang kompeten diperlukan untuk melakukan pengawasan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian negara.

Sejalan dengan penelitian Indrayani dan Widiastuti (Indrayani & Widiastuti, 2020), yang menyatakan bahwa, “kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dalam memoderasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”.

### **Hipotesis 6. Pengaruh Langsung antara Komitmen Pimpinan (KP) terhadap Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (KKLKP) yang dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Hasil perhitungan pengaruh langsung dalam hipotesis 6 menunjukkan bahwa KP terhadap KKLKP yang dimoderasi SDM memiliki koefisien jalur 0,211 dengan t-statistik 2,331 > t-tabel 1,96 dan nilai p-value 0,020 < 0,05 (tingkat signifikansi 5%). Hasil pengujian hipotesis 6 menunjukkan bahwa KP yang dimoderasi SDM memiliki arah positif dan berpengaruh langsung dengan signifikan terhadap KKLKP, sehingga hipotesis 0 ditolak.

Hasil pengujian hipotesis 6 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0.211 pada Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setiap adanya peningkatan satu satuan Komitmen Pimpinan yang dipengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang dapat diartikan, bahwa semakin meningkatnya pengaruh langsung Komitmen Pimpinan yang dipengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia akan meningkatkan Keberlanjutan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara bersamaan.

Dengan terpenuhinya indikator-indikator komitmen pimpinan seperti motivasi dan etos kerja yang baik kepada para pegawai, memberikan tanggung jawab sesuai tugas yang diemban, memastikan terlaksananya aturan-aturan yang berlaku, serta penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi serta kebutuhan instansi sangat berpengaruh terhadap kesuksesan tujuan organisasi.

Sejalan dengan penelitian Widari (2017), yang menemukan bahwa yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kualitas kepemimpinan dan sistem pengendalian intern, dengan korelasi yang sangat kuat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan secara langsung pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat menuju arah yang positif dengan signifikan. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa teknologi informasi yang telah terintegrasi dengan sistem akuntansi pemerintahan sangat membantu seluruh pencatatan transaksi pada pengolahan data keuangan secara aplikatif dari awal sampai tersusunnya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara langsung sistem pengendalian intern pemerintah dapat mempengaruhi keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat menuju arah yang positif dengan signifikan. Organisasi telah berupaya untuk menegakkan integritas dan nilai etika, dimana pimpinan juga

sudah memberikan contoh berperilaku dengan mengikuti kode etik dan peraturan yang ada. Kegiatan pengendalian intern atas setiap transaksi keuangan, pemisahan tugas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, penyediaan dan pemanfaatan informasi, serta pengawasan intern organisasi yang dilaksanakan akan meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kualitas hasil dari laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendorong pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan pengendalian intern untuk meminimalisasi resiko-resiko yang mungkin muncul sebagai akibat tidak terlaksananya pengendalian intern yang memadai.

Secara langsung komitmen pimpinan dapat mempengaruhi keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat menuju arah yang positif dengan signifikan. Hasil penelitian menyatakan bahwa komitmen yang tinggi dari pimpinan organisasi dalam menentukan kebijakan pengelolaan terhadap uang negara, penempatan SDM yang tepat, dan dukungan terhadap tugas-tugas pegawai sangat mempengaruhi keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah yang akan dihasilkan.

Pengaruh kompetensi SDM dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keberlanjutan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa kompetensi SDM merupakan variabel yang tepat dalam memoderasi hubungan tersebut menuju arah hubungan yang positif dan signifikan.

Pengaruh kompetensi SDM dapat melemahkan pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap keberlanjutan kualitas laporan keuangannya. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa kompetensi SDM merupakan variabel yang tidak tepat dalam memoderasi, sehingga hubungan tersebut secara signifikan menuju arah hubungan yang negatif. Ada kemungkinan hal ini disebabkan karena pegawai yang berperilaku kurang bertanggungjawab dalam menerapkan sistem pengendalian intern dalam organisasi.

Pengaruh kompetensi SDM dapat memperkuat pengaruh komitmen pimpinan terhadap keberlanjutan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa kompetensi SDM merupakan variabel yang tepat dalam memoderasi hubungan tersebut menuju arah hubungan yang positif dan signifikan. Pimpinan yang mengerti bagaimana mengelola SDM yang di dukung oleh pegawai yang kompeten akan meningkatkan kinerja organisasi.

### **Saran**

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang ditunjukkan, telah memberikan dasar rekomendasi dalam penyampaian saran bagi peneliti untuk disampaikan bagi pemerintah pusat dan penelitian yang akan datang antara lain; memaksimalkan perkembangan teknologi untuk mempermudah pekerjaan, diimbangi dengan upgrade pengetahuan bagi para pegawai dengan teknologi informasi.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya dari sisi keilmuan tapi juga kepribadian dan perilaku. Diharapkan sistem-sistem yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan dapat terapkan lebih baik bila kompetensi sumber daya manusiamumpuni secara keilmuan dan emosional.

Penerapan sistem pengendalian intern secara menyeluruh tidak hanya di bagian pengelolaan keuangan saja.

Pimpinan harus dapat melihat potensi pegawai dan memotivasi untuk mencapai tujuan oraganisasi yang lebih baik.

---

---

Dalam penelitian berikutnya perlunya ditambahkan variabel lain yang mungkin akan memiliki potensi yang lebih baik untuk menjaga usaha keberlanjutan kualitas laporan keuangan.

### Daftar Pustaka

- Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Sistem Berbasis Akruar, TI, dan SPIP pada Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), 3475–3500.
- Armel, R. Y. G. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *JOM Fekon, Vol.4 No.1 (Februari) 2017, 4*, 105–119.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi sektor publik. In *Jakarta: Erlangga*.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. *Jakarta: Erlangga*.
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). Teori akuntansi. In *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Defitri, S. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *National Conference of Applied Science, Engineering ....*
- Fitriani, A. (2017). Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Lingkungan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada SKPD Provinsi Sulawesi Tengah). *Katalogis*.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares, konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program Smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*.
- Indrayani, K., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 4*. <https://doi.org/10.18196/rab.040148>
- Indriasari, D. (2008a). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang*.
- Indriasari, D. (2008b). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang*.
- Kartika, HR dan Amalia, D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah Kota Magelang. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9)*, 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mahmudi, M. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. *Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta*.

- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). ... *keuangan daerah (sabd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris .... eprints.undip.ac.id.*
- PP Nomor 71. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standard Akuntansi Pemerintahan* (pp. 1–30). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Roshanti, A., Sujana, E., & Sinarwati, K. (2014). *Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan. 2.*
- Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal computing: toward a conceptual model of utilization. *MIS Quarterly*.
- UU Nomor 17. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003* (Vol. 4, pp. 147–173).
- Widari, L., & Sutrisno, S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. ... *Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan ....*
- Yaseen, S. G., Dajani, D., & Hasan, Y. (2016). The impact of intellectual capital on the competitive advantage: Applied study in Jordanian telecommunication companies. *Computers in Human Behavior*.
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 17(2), 165–174.* <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art7>
- Yeny, Y., Karamoy, H., & Poputra, A. T. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset*